

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

3.1.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014

Ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 tumbuh 5,86%, lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2014 ini masih mengindikasikan melambatnya kinerja ekonomi sejak tahun 2012 yang tumbuh 6,64% dan tahun 2013 tumbuh 6,08%. Dengan sistem perekonomian yang amat terbuka, faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja ekonomi, salah satunya adalah dinamika global di berbagai belahan dunia, antara lain Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang, yang berdampak pada kinerja ekspor Nasional dan Jawa Timur. Disamping itu melemahnya kurs rupiah terhadap US Dollar maupun Suku Bunga acuan Bank Indonesia (SBI) yang terus meningkat di tahun 2014 sampai pada 7,75%, sangat mempengaruhi kinerja sektor riil. Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 mencapai 5,86 persen, sedangkan pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,08 persen. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2014 dimaksud lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur
Tahun 2011 – 2014

Keterangan	2011	2012*	2013*	2014*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	884.144	1,247,767.29	1.382.434,85	1.540.696,53
2. PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	366.984	1,124,464.64	1.192.841,86	1.262.700,21
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,22	6,64	6,08	5,86

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

*) menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA 2008

Empat lapangan usaha yang memberikan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tahun 2014 meliputi industri pengolahan sebesar 2,22 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,85 persen, konstruksi

sebesar 0,50 persen dan pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,46 persen. Total sumber pertumbuhan keempat lapangan usaha tersebut mencapai 4,03 persen. Dari sisi produksi, laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum sebesar 8,88 persen.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2012-2014 (%)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.14	3.06	3,63
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.25	1.31	3,65
3.	Industri Pengolahan	6.73	5.85	7,66
4.	Pengadaan Listrik , Gas dan Produksi Es	(3.31)	2.89	2,45
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.91	4.15	0,25
6.	Konstruksi	7.45	8.05	5,44
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.21	6.18	4,61
8.	Transportasi dan Pergudangan	7.24	8.60	6,40
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.68	5.65	8,88
10.	Informasi dan Komunikasi	12.37	12.03	6,34
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.71	14.16	6,95
12.	Real Estate	7.98	7.37	6,97
13.	Jasa Perusahaan	3.19	7.45	8,52
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.39	1.26	0,58
15.	Jasa Pendidikan	8.66	8.60	6,48
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.70	7.96	8,17
17.	Jasa Lainnya	2.81	5.11	5,46
PDRB		6,64	6,08	5,86

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 13,39 persen.

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010
Tahun 2012-2014 (%)

Komponen		2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	5,48	6,57	5,92
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,60	10,85	13,39
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,40	6,43	2,88
4.	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	8,73	4,88	4,37
5.	Perubahan Inventori	(286,81)	(181,92)	83,54
6.	Ekspor Luar Negeri	(4,17)	1,17	0,69
7.	Impor Luar Negeri	11,77	10,48	(1,31)
8.	Net Ekspor Antar Daerah	138,61	(15,74)	(11,20)
PDRB		6,64	6,08	5,86

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Jawa Timur disajikan dalam Tabel 3.4. Selama tiga tahun terakhir struktur ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2014 masing-masing sebesar 28,90 persen, 17,24 persen dan 13,73 persen. Total kontribusi ketiganya sebesar 59,87 persen.

Tabel 3.4
Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2012-2014 (%)

Lapangan Usaha		2012	2013	2014
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.48	13.46	13.73
2.	Pertambangan dan Penggalian	5.30	5.34	5.19
3.	Industri Pengolahan	29.31	28.79	28.90
4.	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0.40	0.37	0.36
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0.10	0.10	0.09
6.	Konstruksi	9.19	9.22	9.47
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.68	17.70	17.24
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.88	3.07	3.20
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.82	4.91	5.19
10.	Informasi dan Komunikasi	4.73	4.78	4.54
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.45	2.64	2.69
12.	Real Estate	1.61	1.63	1.57
13.	Jasa Perusahaan	0.77	0.79	0.79
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.66	2.51	2.31
15.	Jasa Pendidikan	2.64	2.73	2.72
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.60	0.61	0.63
17.	Jasa Lainnya	1.39	1.36	1.38
PDRB		100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tumbuhnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) dan pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ketika ekonomi global yang menjadi pendorong kinerja ekspor luar negeri mengalami perlambatan. Kondisi ini terindikasi di dalam PDRB menurut pengeluaran yang disajikan pada Tabel 3.5.

Kinerja Perdagangan

Nilai ekspor luar negeri Jawa Timur mengalami penurunan dan sebaliknya nilai impor mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2013. Penurunan nilai ekspor diakibatkan oleh menurunnya permintaan di negara-negara utama tujuan ekspor Jawa Timur dan juga diakibatkan oleh penurunan harga komoditas. Nilai impor luar negeri mengalami kenaikan sebesar 59,41 trilyun rupiah. Nilai impor yang tinggi ini tidak terlepas dari struktur impor Jawa Timur yang didominasi oleh impor bahan baku/penolong yang digunakan untuk industri pengolahan di Jawa Timur. Ketergantungan yang tinggi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan melonjaknya nilai impor Jawa Timur karena transaksi yang dilakukan menggunakan mata uang dollar Amerika.

Net ekspor perdagangan antar daerah mengalami kontraksi sebesar 11,20 persen, meskipun secara absolut berdasarkan PDRB ADHB perdagangan antar daerah mengalami surplus sebesar 100,17 triliun rupiah. Nilai surplus ini meningkat sebesar 28,32 trilyun rupiah dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi berdasarkan perhitungan atas harga konstan 2010 nilainya lebih kecil sehingga mengalami kontraksi.

Kinerja perdagangan tahun 2013 Jawa Timur secara total masih mengalami surplus sebesar 26,19 trilyun rupiah, namun pada tahun 2014 mengalami defisit sebesar 6,84 trilyun rupiah. Kondisi di atas tercermin dari data PDRB menurut penggunaan tahun 2014 yang disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
PDRB Jawa Timur Menurut Komponen Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013-2014 (Miliar Rupiah)

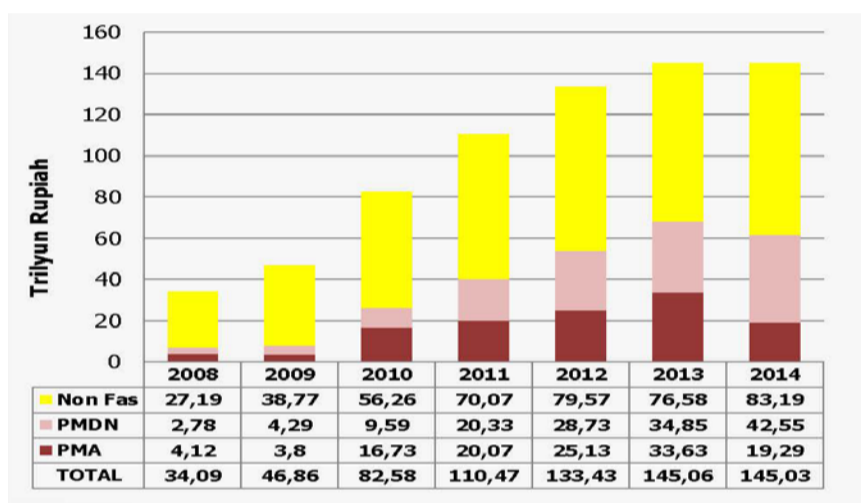
No.	URAIAN	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	<i>892.514,73</i>	<i>983.426,30</i>
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	<i>16.870,93</i>	<i>18.710,65</i>
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	<i>104.357,76</i>	<i>97.679,53</i>
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	<i>380.459,84</i>	<i>419.388,13</i>
5	Perubahan Inventori	<i>(37.964,37)</i>	<i>28.333,62</i>
6	Ekspor Luar Negeri	<i>191.653,93</i>	<i>189.705,94</i>
7	Impor Luar Negeri	<i>237.310,17</i>	<i>296.717,51</i>
8	Net Ekspor Antar Daerah	<i>71.852,21</i>	<i>100.169,88</i>
Produk Domestik Regional Bruto		<i>1.382.434,85</i>	<i>1.540.696,53</i>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kinerja Investasi

Kinerja investasi Jawa Timur menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi PMDN sebesar 7,70 triliun rupiah dan PMDN Non Fasilitas sebesar 6,61 triliun rupiah, namun PMA mengalami penurunan. Total realisasi investasi pada tahun 2014 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan tahun 2013. Penurunan realisasi PMA merupakan dampak dari kebijakan moneter The Fed yang berencana menaikkan suku bunga sehingga terjadi aliran modal keluar (*capital outflow*) karena investor lebih tertarik untuk menanamkan investasinya di Amerika. Penurunan juga diakibatkan sikap *wait and see* investor menjelang pilpres 2014.

Gambar 3.1
Realisasi Investasi Jawa Timur Tahun 2008-2014



Sumber: Badan Penanaman Modal Jawa Timur

Tingkat Inflasi

Laju inflasi tahun kalender (Desember 2013-Desember 2014) Jawa Timur mencapai 7,77 persen. Angka ini lebih tinggi dari pada inflasi tahun kalender (Desember 2012-Desember 2013) sebesar 7,59 persen. Laju inflasi tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan proyeksi inflasi yang ditargetkan dalam RKPD 2015 sebesar 5 ± 1 persen.

Laju inflasi pada bulan Desember selama kurun waktu 2003 s.d 2014 tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014. Tingginya laju inflasi pada bulan Desember 2014 diakibatkan oleh kenaikan harga BBM yang diberlakukan pada tanggal 18 November 2014. Selain itu juga disebabkan oleh kenaikan tarif tenaga listrik pada bulan November 2014, khususnya bagi pelanggan listrik pasca bayar.

Tabel 3.6
Tingkat Inflasi, Andil Inflasi, Inflasi Tahun Kalender dan Inflasi *Year on Year* Bulan Desember 2014 Menurut Kelompok Pengeluaran (Tahun Dasar 2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2013	IHK November 2014	IHK Desember 2014	Inflasi Desember 2014 ¹⁾	Andil Inflasi Desember 2014	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2014 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
UMUM	109.56	115.33	118.07	2.38	2.38	7.77
1 Bahan Makanan	115.95	119.78	123.66	3.24	0.65	6.65
2 Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	108.87	117.06	118.64	1.35	0.22	8.97
3 Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	107.03	113.22	115.16	1.71	0.42	7.60
4 Sandang	101.29	104.20	105.21	0.97	0.06	3.87
5 Kesehatan	104.81	111.33	112.25	0.83	0.04	7.10
6 Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga	104.54	108.03	108.35	0.30	0.02	3.64
7 Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	113.54	120.82	126.84	4.98	0.96	11.71

1) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2014 terhadap IHK bulan sebelumnya
2) Persentase perubahan IHK bulan Desember 2014 terhadap IHK bulan Desember 2013

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang tahun 2014 adalah bensin, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, beras, angkutan dalam kota, angkutan udara, semen, cabe merah, mie, dan telur ayam ras. Kenaikan tarif angkutan baik angkutan dalam kota maupun angkutan antar kota merupakan salah satu faktor tingginya inflasi kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang diakibatkan oleh kenaikan BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Kenaikan tarif tenaga listrik juga berperan signifikan dalam memicu tingginya laju inflasi. Inflasi kelompok bahan makanan banyak dipengaruhi oleh faktor pergantian musim kemarau menjadi musim penghujan dimana banyak komoditi sayur dan buah yang mengalami kebusukan sehingga supplainya berkurang, dan tingginya harga komoditi bahan makanan akibat adanya perayaan natal, tahun baru, serta maulid Nabi Muhammad yang waktunya berdekatan.

Kinerja Perbankan

Berdasarkan laporan kinerja perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan kinerja bank umum sampai dengan triwulan III 2014 secara umum masih stabil dengan tren perlambatan pertumbuhan kredit yang didukung oleh penurunan risiko kredit. Tercatat aset bank umum sampai dengan periode laporan adalah sebesar Rp 474,97 triliun dengan pertumbuhan sebesar 12,95% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 14,32% (yoy). Pertumbuhan kredit melambat dari 14,41% (yoy) pada triwulan III 2014 menjadi 13,26% (yoy) pada triwulan IV 2014 dengan nominal sebesar Rp

344,42 triliun. Sementara itu DPK bank umum Jawa Timur sampai dengan periode laporan sebesar Rp 383,29 triliun, turun dari 17,04% (yoy) pada triwulan III 2014 menjadi 14,31% (yoy) pada triwulan IV 2014. Sedangkan LDR meningkat dari sebesar 88,05% menjadi 89,86% pada periode laporan.

Tabel 3.7
Perkembangan Indikator Bank Umum di Jawa Timur

INDIKATOR BANK UMUM (Triliun Rp)	2013				2014			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Total Aset	362,32	379,47	406,88	420,52	417,36	442,61	465,12	474,97
Growth Aset (%yoy)	19,10	17,52	18,74	18,93	15,19	16,64	14,32	12,95
Dana Pihak Ketiga	293,35	300,50	317,37	335,31	332,45	350,74	371,46	383,29
Growth DPK (%yoy)	14,82	12,93	14,33	14,74	13,33	16,72	17,04	14,31
Kredit Lokasi Bank	246,51	266,82	285,87	304,11	304,41	318,60	327,06	344,42
Growth Kredit (%yoy)	27,27	26,41	27,27	26,41	23,49	19,41	14,41	13,26
Kredit Lokasi Proyek	282,99	303,93	324,60	343,07	344,76	363,11	379,74	395,37
Growth Kredit (%yoy)	26,55	25,39	24,96	24,59	21,83	19,47	16,99	16,99
LDR Lokasi Bank (%)	84,03	88,79	90,08	90,70	91,57	90,83	88,05	89,86
LDR Lokasi Proyek (%)	96,47	101,14	102,28	102,32	103,70	103,53	102,23	103,15
NPL Lokasi Bank (%)	2,26	2,12	2,01	1,75	2,07	2,12	2,08	1,82
NPL Lokasi Proyek (%)	2,25	2,14	1,96	1,96	2,18	2,27	2,34	2,03

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

3.1.1.2. Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015

Berdasarkan perkembangan terkini kondisi perekonomian global dan domestik serta kebijakan pemerintah maka beberapa proyeksi makro ekonomi Jawa Timur tahun 2015 diperkirakan akan mengalami deviasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan rencana jangka menengah yang sudah ditetapkan. Proyeksi makro ekonomi Jawa Timur 2015 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.8
Proyeksi Makro Ekonomi Jawa Timur 2015

Indikator	2014	RPJMD 2014-2019	RKPD*)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	5,86	6,88 – 7,19	6,04 – 6,11
2. Inflasi (%)	7,77	5 ± 1	5 ± 1

*) Berdasarkan revisi akademis Pusat kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan Universitas Brawijaya

Sebagaimana Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015 adalah 6,88% – 7,19%. Berdasarkan review akademis dan kondisi perekonomian terkini maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diproyeksikan pada kisaran 6,04-6,11%. Sektor-sektor yang memberikan sumber pertumbuhan tinggi diharapkan mampu berakselerasi lebih cepat di tahun 2015. Sektor-sektor yang memberikan

sumber pertumbuhan tinggi diharapkan mampu berakselerasi lebih cepat di tahun 2015. Berdasarkan lapangan usaha, sektor industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur. Kebijakan di bidang perijinan yang lebih atraktif juga diharapkan mampu menarik investasi di Jawa Timur.

Kinerja sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah industri pengolahan yang pada tahun 2014 memberikan sumber pertumbuhan tertinggi kedua juga diproyeksikan akan lebih cepat pada tahun 2015. Membaiknya kemampuan daya beli masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sektor ini.

Pembangunan infrastruktur juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Produksi dan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga diharapkan mengalami peningkatan seiring dengan perbaikan infrastruktur dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberikan titik berat pada di sektor tersebut.

Ekspor luar negeri yang mengalami penurunan di tahun 2014 diharapkan dapat meningkat kembali pada tahun 2015. Berbagai terobosan untuk lebih selektif dalam memilih pasar luar negeri yang secara umum saat ini sedang mengalami kelesuan dilakukan untuk meningkatkan kinerja ekspor Jawa Timur. Nilai impor ditargetkan untuk menurun seiring dengan kebijakan pengembangan substitusi impor. Mekuatnya nilai tukar rupiah juga diharapkan mampu menekan nilai impor Jawa Timur.

Net ekspor antar daerah ditargetkan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Nilai net ekspor antar daerah tahun 2014 sudah melampaui target RPJMD untuk tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 93,13 trilyun rupiah. Analisis terhadap kondisi eksternal yang masih belum stabil, maka memperkuat fungsi Kantor Perwakilan Dagang (KPD) merupakan strategi penting untuk mampu mendukung kinerja perdagangan domestik dan pertumbuhan ekonomi, ketika kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat masih cukup potensial mendorong sektor produksi.

Arus investasi pada tahun 2015 ditargetkan mengalami peningkatan. Jaminan terhadap ketersediaan energi listrik, gas untuk industri, tenaga kerja yang demokratis, lahan dengan harga yang terjangkau, ketersediaan kawasan industri, pelayanan perijinan yang lebih transparan dan akuntabel, perbaikan kualitas dan kuantitas infrastruktur merupakan faktor-faktor yang diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi di Jawa Timur. Upaya-upaya promosi dan

penyediaan prospectus investasi yang *reliable* juga dilaksanakan untuk menarik investor. Kondisi lalu-lintas di Jabodetabek yang semakin macet memberikan peluang tersendiri bagi Jawa Timur untuk menerima investor yang akan melakukan ekspansi usahanya.

Tingkat inflasi pada tahun 2015 diproyeksikan sebesar 5 ± 1 , mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Dampak kenaikan bahan bakar premium dan solar serta kenaikan tarif tenaga listrik diperkirakan akan berangsur turun pada tahun 2015. Peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus ditingkatkan untuk melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas di Provinsi Jawa Timur.

Proyeksi-proyeksi tersebut akan tercapai selama asumsi-asumsi kondisi eksternal (global) dan internal, baik nasional maupun regional berikut terjadi. Asumsi-asumsi tersebut meliputi:

1) Lingkungan eksternal (Global)

Pertama, Negara negara tujuan ekspor utama dari Jawa Timur diharapkan sudah terdapat pemulihan ekonomi secara signifikan, khususnya di Amerika serta Eropa maupun di negara-negara Asia. Stabilitas makro ekonomi global menjadi penting untuk dapat mempengaruhi permintaan (ekspor) luar negeri yang pada 2014 secara nasional masih terjadi defisit, dan berpengaruh pula terhadap neraca transaksi berjalan perdagangan Jawa Timur untuk ekspor dan impor luar negeri.

Kedua, Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta Eropa Timur khususnya mengenai krisis Rusia - Ukraina diharapkan segera berakhir sehingga tidak berimbas terhadap stabilitas makro ekonomi global.

Ketiga, Harga minyak dan harga komoditas. Penurunan harga minyak yang diakibatkan oleh suplai yang berlebih serta penurunan permintaan secara global akan berdampak signifikan bagi Indonesia dan Jawa Timur. Sebagai negara yang merupakan net importir minyak maka ini merupakan momentum yang baik untuk mendorong pembangunan nasional karena pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan minyak akan berkurang, sehingga ruang fiskal nasional akan menjadi lebih longgar untuk kepentingan stimulus ekonomi khususnya untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain penurunan harga komoditas akan mempengaruhi kinerja perdagangan Jawa Timur yang selama ini menjadi pintu gerbang perdagangan luar negeri untuk Indonesia bagian Timur. Dalam jangka pendek harga komoditas diharapkan kondisinya akan membaik sehingga kinerja perdagangan luar negeri Jawa Timur akan menerima dampak

positifnya. Pada saat yang bersamaan program untuk meningkatkan ekspor berbasis manufaktur juga harus terus digalakkan.

Keempat, Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 sebagai pasar tunggal/pasar bersama masyarakat ASEAN diharapkan akan menjadi peluang untuk mampu meningkatkan kapasitas perdagangan serta dampak di sektor produksi domestik termasuk Jawa Timur.

2) Lingkungan Internal (Nasional)

Pertama, Pelambatan ekonomi nasional tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,02% dari sebelumnya tahun 2013 yang tumbuh 5,78 %, diharapkan tidak akan berkepanjangan. Dalam nota keuangan APBN-P 2015, tahun 2015 ekonomi nasional diproyeksikan tumbuh sebesar 5,7 persen. Proyeksi Bank Dunia ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5,2 persen pada tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut bisa menjadi lebih cepat apabila fondasi ekonomi yang lain menjadi lebih kuat dan iklim investasi di dalam negeri menjadi lebih kondusif. Penurunan harga minyak juga memberikan sinyal positif terhadap neraca perdagangan nasional yang pada bulan Desember 2014 dan bulan Januari 2015 mengalami surplus. Kondisi ini memberikan momentum bagi perekonomian nasional dan Jawa Timur untuk diakselerasi dengan memanfaatkan penghematan anggaran penyediaan minyak dalam negeri untuk membangun infrastruktur yang pada akhirnya akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, Beberapa indikator makro ekonomi nasional dalam APBN Perubahan 2015 menunjukkan hal yang optimis ditengah kondisi global yang masih belum stabil. Beberapa indikator ekonomi tahun 2015 yang diharapkan sesuai dengan prediksi antara lain pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,7 persen, inflasi mencapai 5,0 persen, suku bunga acuan (SPN 3 bulan) pada kisaran 6,2 persen, lifting minyak mencapai 825 ribu barel per hari, harga minyak mentah 60 US Dollar per barel, rata-rata nilai tukar rupiah pada Rp 12.500 per US Dollar.

Ketiga, Kebijakan moneter dan fiskal pemerintah. Di bidang kebijakan moneter, BI rate sudah diturunkan dari level 7,75% menjadi 7,5%. Ini pertanda baik, bahwa kebijakan uang ketat sudah mulai bergeser untuk memacu kinerja sektor riil. Ruang fiskal pemerintah yang lebih longgar diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyediaan infrastruktur yang selama ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Perbaikan infrastruktur diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi investasi

baik PMA maupun PMDN. Harmonisasi antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diharapkan mampu mendorong tumbuhnya sektor riil.

3) Lingkungan Internal (Provinsi)

Pertama, Indikator makro ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sejak tahun 2011 sebesar 7,22% terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 5,86 persen. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2014 masih lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,02 persen. Kebijakan pemerintah untuk mengalihkan belanja di sektor yang lebih produktif diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Kedua, Pengeluaran konsumsi masyarakat Jawa Timur yang mencapai 63,83% masih menjadi kekuatan fundamental dalam menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, ketika lingkungan eksternal masih mengalami distorsi. Kebijakan-kebijakan yang lebih ramah terhadap investasi, harmonisasi peraturan dari level pusat sampai dengan kabupaten/kota, pemberian insentif baik fiskal maupun nonfiskal diharapkan dapat meningkatkan kinerja investasi sehingga tercapai target pertumbuhan yang direncanakan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

3.1.2.1. Tantangan Perekonomian 2016 dan 2017

Dengan situasi perekonomian yang terjadi pada tahun 2013 menuju tahun 2014, serta proyeksi perekonomian tahun 2015 maka tantangan pokok yang akan dihadapi pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:

1. *Implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)* pada akhir 2015 diperkirakan akan memberikan dampak terhadap perekonomian Jawa Timur. Pasar tunggal ASEAN akan mengakibatkan terjadinya persaingan antar anggota MEA dalam merebut pasar. Potensi demografi Jawa Timur yang cukup besar akan mendapatkan penawaran yang beragam dari negara-negara anggota MEA, dan pada saat yang bersamaan produsen-produsen lokal harus mengalami persaingan dengan produsen dari negara lain. Sebagai basis produksi Jawa Timur

akan mengalami persaingan dengan negara-negara anggota MEA dalam memberikan layanan dan kemudahan dalam berinvestasi.

2. *Globalisasi* perekonomian menuntut Jawa Timur untuk meningkatkan efisiensi, daya saing serta meningkatkan kinerja perdagangan internasional melalui *international trade friendship*. Berakhirnya era buruh murah dan kenaikan biaya energi akan sangat mempengaruhi efisiensi dari sektor industri pengolahan. Untuk mampu berkompetisi di level global, daya saing baik sektoral maupun kewilayahan merupakan hal mutlak yang harus dipersiapkan. Industri yang berkembang di Jawa Timur seyogyanya mampu masuk ke dalam rantai produksi global (*global production chain*) sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.

3. *Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif*

Tantangan Jawa Timur bukan hanya pertumbuhan yang tinggi, namun juga pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur, merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan cukup berat mengingat, pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakan oleh sektor konsumsi. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang bisa mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi pada sektor riil. Selain itu, diperlukan suatu kebijakan pengembangan industri yang berorientasi kepada industri yang berbahan baku lokal dan memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang yang besar serta berbasis padat karya (*labour intensive industry*). Pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas dan pengurangan pengangguran merupakan instrumen korelatif dari percepatan pertumbuhan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu basis investasi dan ekspor merupakan variabel penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan pendapatan dengan distribusi pendapatan yang merata dan mampu mengurangi disparitas.

4. *Penanganan Bencana Alam*

Kejadian bencana alam memang tidak dapat diprediksi (*un-predictable*), namun bisa juga diprediksi untuk kejadian tertentu dan kesemuanya dapat menimbulkan dampak/resiko baik sosial maupun resiko ekonomi. Ini adalah tantangan yang harus menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan kedepan, baik dalam manajemen pencegahan (untuk bencana tertentu yang diakibatkan oleh distorsi fungsi sumberdaya alam),

manajemen penanggulangan, manajemen resiko/dampak, maupun manajemen pemulihan dari bencana.

3.1.2.2. Prospek Ekonomi Tahun 2016 dan Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2015 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan yang tinggi untuk tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan review akademis dan kondisi perekonomian terkini maka target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar 6,26% – 6,33% dan pada tahun 2017 diproyeksikan sebesar 6,48% - 6,55%. Faktor-faktor eksternal dan domestik yang lebih kondusif akan menjadi pendorong kinerja pertumbuhan ekonomi. Dari sisi eksternal, semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan tumbuh di atas 4,0 persen dan disertai peningkatan volume perdagangan berdampak pada membaiknya neraca perdagangan Jawa Timur. Dari sisi domestik, berbagai pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang antara lain terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian, pelabuhan dan prasarana transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya akan mendorong peningkatan kegiatan investasi. Langkah-langkah tersebut juga akan mendorong perbaikan iklim usaha dan aktivitas investasi oleh pihak swasta dan pada gilirannya kapasitas produksi nasional. Dari sisi konsumsi, struktur demografi masih menjadi modal dasar kuatnya konsumsi domestik. Pada saat yang sama, semakin terjaga dan menurunnya laju inflasi juga turut memberikan dampak positif bagi peningkatan permintaan agregat.

Dengan membaiknya kondisi global, kinerja perdagangan Jawa Timur akan mendapatkan imbas positif dengan naiknya permintaan. Ekspor luar negeri ke negara-negara konvensional diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di negara-negara tersebut. Nilai importasi juga diperkirakan mengalami penurunan seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah dan adanya pemenuhan terhadap barang yang sebelumnya diimpor (substitusi impor).

Kinerja investasi juga diperkirakan mengalami peningkatan. Ketersediaan kawasan industri, listrik, energi untuk industri, selesainya proyek-proyek infrastruktur, insentif penanaman modal baik fiskal maupun nonfiskal menjadi daya tarik bagi investor. Pelayanan perijinan yang akuntabel, profesional dan transparan sebagai bagian dari reformasi birokrasi, kepastian hukum dan fasilitasi potensi permasalahan antara investor dengan tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan investasi pada tahun 2016 dan 2017.

Laju inflasi diproyeksikan mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017. Upaya-upaya pengendalian inflasi secara terbatas melalui TPID, penyediaan informasi suplai dan demand yang lebih luas, perbaikan infrastruktur dan kapasitas produksi, serta peningkatan produksi dan produktivitas pertanian Jawa Timur diharapkan mampu berperan signifikan dalam menekan laju inflasi pada tahun 2016 dan 2017.

3.1.3. Kebijakan Ekonomi

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serangkaian kebijakan di bidang makro dan mikro akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:

1. Kebijakan Makro Ekonomi, diarahkan untuk:
 - a) Mendorong otoritas moneter bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Menteri Keuangan untuk menjaga stabilitas makro ekonomi dalam rangka kondusivitas iklim berusaha.
 - b) Mendorong otoritas moneter untuk mengevaluasi suku bunga bank pelaksana agar lebih kompetitif dalam rangka mendukung pembiayaan sektor riil.
 - c) Ikut serta dalam menjaga stabilitas makro ekonomi di daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi melalui optimalisasi kinerja TPID maupun fasilitas bantuan ongkos angkut untuk komoditi tertentu yang pada waktu-waktu tertentu mengalami inflasi yang tinggi.
2. Mikro Ekonomi, dalam rangka menumbuhkan sektor riil diarahkan untuk:
 - a) Meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dalam rangka peningkatan pencapaian swasembada pangan, khususnya padi, jagung, daging dan gula maupun peningkatan produksi signifikan komoditi kedele.
 - b) Peningkatan produksi dan daya saing sektor industri, termasuk industri kreatif dengan menciptakan penataan struktur industri yang mampu membangun jaringan /hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.
3. Kebijakan Pendukung Kinerja Ekonomi
 - a) Reformasi Birokrasi melalui optimalisasi Pelayanan Publik, khususnya perijinan satu pintu (PTSP), memberikan jaminan kepastian terhadap penyediaan lahan untuk kawasan industri,

ketersediaan energi maupun dukungan iklim perburuhan yang kondusif.

b) Pengembangan SDM diarahkan untuk meningkatkan produktivitas SDM, baik melalui Jalur Pendidikan Formal maupun program khusus yaitu (a) Meningkatkan rasio SMK terhadap SMU, (b) lanjutan pengembangan SMK Mini, (c) Mengoptimalkan fungsi BLK untuk meningkatkan pelatihan tenaga kerja berstandar internasional.

c) Pengembangan Infrastruktur yang mendukung kinerja ekonomi, melalui:

- 1) Bidang Transportasi, melakukan percepatan pembangunan moda transportasi darat, laut dan udara untuk mengoptimalkan konektivitas baik di internal maupun Jawa Timur dengan kawasan eksternal untuk efektivitas mobilisasi barang dan jasa.
- 2) Bidang Kebinamargaan, melakukan koordinasi untuk percepatan pembangunan ruas-ruas trans tol Jawa, pemeliharaan dan peningkatan jalan arteri dan jembatan nasional, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan provinsi, serta stimulasi melalui kemampuan keuangan daerah terhadap peningkatan jalan-jalan kabupaten/kota.
- 3) Bidang Pengairan, diarahkan untuk melakukan percepatan pembangunan waduk dan bendungan untuk peningkatan Indeks Pertanaman dari 1,86 menjadi 2,3 sehingga akan terdapat tambahan areal tanam dalam jangka panjang sebesar 345.775 Ha.
- 4) Bidang Energi, melalui koordinasi dengan Pemerintah, untuk tetap menjaga surplus pasokan listrik baik untuk peningkatan elektrifikasi maupun untuk kebutuhan industri, maupun mempercepat realisasi proses eksplorasi Pembangkit-pembangkit Listrik tenaga panas bumi, maupun dari sumber-sumber energi yang terbarukan lainnya seperti mikro hidro dan sebagainya.
- 5) Infrastruktur Regulasi diarahkan untuk efektivitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam

menerbitkan kebijakan lokal (perda/peraturan kepala daerah) untuk stimulus kinerja pembangunan ekonomi.

d) Pembiayaan, kebijakan di bidang pembiayaan diarahkan untuk:

- 1) Mendorong perbankan untuk mengoptimalkan skema-skema kredit yang kompetitif untuk sektor riil
- 2) Skema kredit dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil baik dengan skema pinjaman bunga murah 6%, Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida, Pembiayaan sektor pertanian melalui penempatan modal di PT Bank UMKM.
- 3) Mengoptimalkan pola-pola kerjasama pemerintah-swasta.
- 4) Mendorong peran Perseroan maupun BUMN dalam mengalokasikan pemanfaatan CSR/PKBL untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui undang-undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.

Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah

daerah. Hal ini terjadi karena sebagaimana APBD pemerintah daerah hanya untuk belanja pegawai (gaji), sehingga pemerintah daerah kurang leluasa di dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan Daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusidaerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pendapatan daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup : a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, c). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/sekelompok usaha masyarakat. Jenis-jenis lain pendapatan asli daerah yang sah, dipisahkan menurut obyek pendapatan, yang terdiri dari : a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b). Jasa giro, c). Pendapatan bunga, d). Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, e). Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah, f). Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan denda pajak, i). Pendapatan denda retribusi, j). Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, k). Pendapatan dari pengembalian, l). Fasilitas sosial dan fasilitas umum, m). Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, n). Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Kelompok dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup : bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi umum. Sedangkan jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut jenis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup : a. Hibah dari pemerintah, b. Dana darurat, c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kab./kota, d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga

mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat "*limitative*".

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2013-2016, tercantum pada tabel 3.9. berikut :

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2013-2018

NOMOR URUT	URAIAN	REALISASI		TARGET RKPD	TARGET APBD	TARGET RKPD	PERKIRAAN MAJU	PERKIRAAN MAJU
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.579.340.719.022,00	14.462.753.136.957,30	14,558,856,495,752.70	14,771,139,275,000.00	15,967,974,754,130.50	17,486,035,907,305.00	19,016,890,049,709.90
1.1	Pajak Daerah	9.404.933.622.356,69	11.517.684.926.168,60	12.541.000.000.000,00	12,591,000,000,000.00	13,807,000,000,000.00	15,173,000,000,000.00	16,539,000,000,000.00
1.2	Retribusi Daerah	106.213.770.751,90	148.638.035.645,33	104,823,449,246.12	136,337,487,000.00	109,041,722,098.80	111,656,597,233.87	115,697,093,937.11
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	332.020.394.955,52	342.920.271.075,28	353,566,454,883.20	351,344,506,000.00	367,709,113,078.53	382,417,477,601.67	397,714,176,705.74
1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.736.172.930.957,86	2.453.509.904.068,12	1,559,466,591,623.35	1,692,457,282,000.00	1,684,223,918,953.22	1,818,961,832,469.48	1,964,478,779,067.04
2.	DANA PERIMBANGAN	3.092.884.299.095,00	3.485.336.767.166,00	3,407,812,754,445.26	4,345,684,182,500.00	3,458,769,937,424.29	3,510,746,264,062.90	3,563,762,117,234.28
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.374.591.582.095,00	1.516.912.612.166,00	1,503,933,605,745.26	2,692,383,285,500.00	1,516,813,205,750.29	1,529,950,397,755.42	1,543,350,333,600.65
2.2	Dana Alokasi Umum	1.632.648.287.000,00	1.866.548.185.000,00	1.903.879.148.700,00	1,587,261,707,000.00	1,941,956,731,674.00	1,980,795,866,307.48	2,020,411,783,633.63
2.3	Dana Alokasi Khusus	85.644.430.000,00	101.875.970.000,00	-	66,039,190,000.00	-	-	-
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.700.543.525.734,00	2.844.930.590.606,00	2.800.570.060.000,00	3,746,714,308,000.00	2,800,570,060,000.00	2,800,570,060,000.00	2,800,570,060,000.00
3.1	Pendapatan Hibah	39.728.179.934,00	45.478.647.460,00	23.150.000.000,00	45,141,281,000.00	23,150,000,000.00	23,150,000,000.00	23,150,000,000.00
3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	2.660.815.345.800,00	2.799.451.943.146,00	2.777.420.060.000,00	3,701,573,027,000.00	2,777,420,060,000.00	2,777,420,060,000.00	2,777,420,060,000.00
	PENDAPATAN DAERAH	17.372.768.543.851,00	20.793.020.494.729,30	20,767,239,310,197.90	22,863,537,765,500.00	22,227,314,751,554.80	23,797,352,231,367.90	25,381,222,226,944.20

Keterangan : Data Realisasi 2013 (Audit BPKAD), Realisasi tahun 2014 (Unaudit Februari 2015) dan Target RKPD 2015, 2016 dan Perkiraan Maju 2017,2018 sesuai RPJMD Tahun 2014-2019)

3.2.1. Arah Kebijakan Sumber dan Penggunaan Pembiayaan Pembangunan Daerah

3.2.1.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Untuk diarahkan pada:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari

UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan provinsi Jawa Timur serta dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4. Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi.

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan SILPA tahun berjalan.

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

SiLPA tahun 2016 diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi : Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).

3.2.1.4. Arah Kebijakan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Daerah

Pencapaian target kinerja pembangunan daerah dari tahun ketahun diharapkan terus mengalami peningkatan dan konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di Daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk mengatasi hal tersebut maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*) maupun melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional. Dalam upaya merealisasikan kebijakan pengembangan pembiayaan pembangunan daerah diarahkan pada :

1. Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah dan Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :
 - a. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/*Public Private Partnership*, yaitu Pelibatan sector *private* dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui berbagai skema kerjasama antara lain *build operate and transfer (BOT)*, *build transfer operate (BTO)*, *leases*, *concessions* diarahkan untuk meningkatkan dan memperluas layanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
 - b. Kinerja pembangunan yang telah dicapai tidak terlepas dari dukungan semua pihak, termasuk Dunia Usaha melalui pelaksanaan

pelaksanaan Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta dukungan Lembaga Non Pemerintah lainnya.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011, program Tanggungjawab Sosial Perusahaan meliputi Bina Lingkungan dan Sosial, Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dan Program Langsung pada masyarakat, yang dalam pelaksanaannya meliputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Penanganan Bencana Alam, Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan lain-lain.

Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP), sebagai salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kontribusi ini lebih didasarkan kepada kesukarelaan dan fasilitasi yang di berikan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk memperluas dan mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah melalui penyediaan data base, sinergi dan sinkronisasi program, joint monitoring, dan pembinaan teknis.

Realisasi pelaksanaan TSP tahun 2013 dan 2014 yang dilaporkan kepada Sekretariat Tim Fasilitasi TSP Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan CSR/TJSL Yang Dilaksanakan Perusahaan Di Jawa Timur Tahun 2013-2014

No.	Perusahaan	Realisasi Dana CSR		Ket.
		2013	2014	
1	2	3	4	5
1	BANK UMKM	150.750.000	107.100.000	Data per September 2014, jumlah dari 27 Perusahaan di Jatim
2	BNI	2.641.856.062	2.211.252.964	
3	KAI DAOP 8	25.650.000	-	
4	PLN DIST JATIM	2.224.090.000	-	
5	BANK BRI	4.093.555.000	-	
6	JASA TIRTA	1.004.800.000	-	
7	PELINDO III	7.771.097.550	4.239.399.800	
8	PT SIER	1.441.815.775	512.810.000	
9	PT ASABRI	2.040.240.875	-	
10	PT ASKES	47.504.000	-	
11	PT BPD JATIM	9.917.663.884	11.932.951.800	
12	PT JASA MARGA	970.763.900	46.525.067.256	
13	PT JASA RAHARJA	806.600.000	-	
14	PT PAL	2.128.380.000	1.752.235.000	
15	PT PGN	13.380.639.935	-	

16	PT SUCOFINDO	196.589.500	1.325.000.000
17	PT INDOLAKTO	146.642.000	-
18	PT PETROGAS JATIM UTAMA	312.456.224	240.850.000
19	PT KERTAS LECES	486.158.403	102.629.048
20	PT PDAB JATIM	288.236.293	-
21	PT PN XII	1.607.125.000	-
22	PT TASPEN	458.946.298	310.629.048
23	PT ASKRINDO	366.250.000	-
24	PT BANK BTN	1.478.560.000	-
25	PT ANGKASA PURA I	157.500.000	-
26	PT JATIM GRAHA UTAMA	-	-
27	PT PN X	194.942.138.043	88.721.792.514
28	PT DANAREKSA	360.000.000	-
29	PT PN XI	38.550.494.435	17.342.659.125
30	PT PERTAMINA	14.178.496.250	-
31	PT WASKITA KARYA	-	1.427.500.000
32	PG KREGET BARU	-	1.138.914.700
33	PG KEBON AGUNG MALANG	-	2.275.570.670
34	PT PETRO KIMIA GRESIK	-	32.504.831.890
35	PT JAMKRINDO	-	422.906.800
36	PT INKA	-	1.027.998.225
37	PT GARAM	-	3.664.725.000
38	PT CJI	-	931.865.000
39	PT PEGADAIAN PERSERO	-	2.709.562.000
40	PERHUTANI	-	1.950.000.000
41	PT BUKIT ASAM	-	31.250.000
42	PT GUDANG GARAM	-	2.415.278.000
JUMLAH :		302.174.999.427	225.824.165.210

Sumber data : Bappeda Provinsi Jatim (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2013 pelaksanaan TSP di Jawa Timur mencapai Rp.302.174.999.427,- jumlah tersebut yang dilaporkan oleh 30 Perusahaan di Jawa Timur, sedangkan pada tahun 2014 (per September) pelaksanaan TSP yang dilaporkan 27 Perusahaan mencapai Rp.225.824.165.210,- . sehingga apabila seluruh Perusahaan baik BUMS maupun BUMN dan BUMD melaporkan kegiatan CSR atau PKBL yang dilaksanakan maka jumlahnya akan jauh lebih besar.

Berdasarkan tabel 3.2 Realisasi anggaran program dan kegiatan CSR/TJSL yang dilakukan Prusahaan di Jawa Timur tahun 2013 dan 2014 (September), per bidang dan kegiatan meliputi : Bidang UMKM atau Kemitraan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Sosial, Sarana Umum, Sarana Ibadah atau Keagamaan, Bencana Alam, Kebudayaan, dan Olah Raga sebagai berikut :

Tabel. 3.11
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan CSR/TJSL Yang Dilaksanakan Perusahaan
Di Jawa Timur Tahun 2013-2014

NO.	Bidang / Kegiatan	Realisasi Anggaran CSR (Rp.)		Ket.
		2013	2014 (September)	
1.	UMKM / KEMITRAAN - Bantuan Pembiayaan - Pelatihan Manajemen Terapan - Peningkatan Mutu Produksi - Peningkatan Akses Pemasaran	252.968.414.228	185.204.202.839	Data per September 2014, jumlah dari 27 Perusahaan di Jatim dan Tahun 2013 jumlah perusahaan yang mengirim laporan 30 Perusahaan
2.	PENDIDIKAN - Beasiswa - Fasilitas KBM - Peralatan Siswa	19.160.309.037	9.051.335.207	
3.	KESEHATAN - Pengobatan - Penyuluhan Hidup Sehat - Makanan Tambahan - Fasilitas Kesehatan - Peralatan Kesehatan	8.281.056.409	5.948.345.277	
4.	LINGKUNGAN - Penghijauan Kota - Pelestarian Das - Daur Ulang Sampah - Energi Baru / Terbarukan - Pelatihan Pelestarian Lingkungan	2.114.920.947	2.062.509.000	
5.	SOSIAL - Bantuan Keuangan Duafa - Bantuan Yatim Piatu - Bantuan Anak Jalanan - Bantuan Khitaman Masal	9.197.266.625	7.613.834.725	
6.	SARANA UMUM - Prasarana Umum	6.150.500.693	6.505.242.680	
7.	SARANA IBADAH / KEAGAMAAN - Bantuan sarana ibadah - Bantuan keagamaan	4.075.497.488	3.498.622.918	
8.	BENCANA ALAM - Bantuan Bencana Alam	185.234.000	5.156.216.764	
9.	KEBUDAYAAN - Bantuan Kebudayaan	41.800.000	730.268.800	
10.	OLAH RAGA - Bantuan Olah Raga	-	53.580.000	
JUMLAH :		302.174.999.427	225.824.165.210	

Sumber data : Bappeda Provinsi Jatim (diolah)

2. Arah Kebijakan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, melalui kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 13 dan 363-367 tersirat adanya regulasi kerja sama daerah antara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dan Lembaga baik dalam provinsi maupun luar provinsi.

Kerja sama daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar-daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kerja sama sukarela dilaksanakan oleh daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kerja sama daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah, provinsi akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi.

Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, dan melihat begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus diatasi atau dipenuhi terutama daerah yang wilayahnya berbatasan secara administratif dengan daerah yang lain bahkan mitra luar negeri dan lembaga/pihak. Untuk itu sangat diperlukan sebuah kerjasama daerah dengan memperhatikan identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip-prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Terlebih ketika didalamnya adalah pelaksanaan kerjasama yang melibatkan mitra bukan saja antar pemerintah daerah dalam negeri, namun mitra dari luar negeri maupun pihak ketiga.

Isu dan gejala-gejala negatif termasuk egosentris daerah tersebut, tentunya patut mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah baik ditingkat provinsi maupun pusat. Guna melihat kepentingan yang lebih luas bahwa kerjasama daerah bertujuan untuk perekat bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melihat letak dan kondisi geografis Indonesia khususnya Jawa Timur serta perbedaan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik seperti sekarang ini maka hubungan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain patut mendapat perhatian serius.

3. Arah Kebijakan Pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Kebijakan pengembangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri diarahkan untuk digunakan pada bidang-bidang yang mempunyai derajat *certainty* yang tinggi utamanya untuk pembangunan infrastruktur publik yang mempunyai daya ungkit kepada perekonomian daerah. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta maupun kemitraan dengan lembaga non pemerintah merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat (*civil society*).

Terhadap program dan kegiatan dalam prioritas pembangunan daerah, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas atau infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha serta lembaga non

pemerintah atau lembaga donor melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema diantaranya Kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, kemitraan ini diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Usaha pembangunan nasional berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan kenyataan bahwa perekonomian Indonesia telah bangkit kembali sejak krisis keuangan Asia. Hal ini bisa tercapai tidak hanya karena faktor peran pemerintah belaka, namun merupakan hasil kerjasama antara pemerintah dengan kelompok masyarakat, lembaga donor dan NGO. Oleh karena itu pemerintah sangat menyadari peran penting lembaga donor dan *Non Governmental Organization (NGO)*.

Sementara itu saat ini lembaga non pemerintah atau lembaga donor dan NGO yang mempunyai program dan kegiatan yang tercatat di Provinsi Jawa Timur sekitar 17 lembaga non pemerintah atau lembaga donor, namun sesuai catatan dari Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri sekitar 54 lembaga yang ada di Jawa Timur, sehingga diperlukan kebijakan agar semua lembaga non pemerintah atau NGO yang melakukan kegiatan di Jawa Timur tercatat dan melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 bahwa untuk mendukung pencapaian target kinerja pembangunan dapat dilaksanakan kerjasama daerah dengan lembaga non pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, potensi daerah dan bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah. Sesuai surat Kemendagri nomor 135/8898/SJ tanggal 20 Desember 2014 bahwa daerah agar membentuk Forum Koordinasi Mitra Pembangunan diwilayah dengan surat keputusan Gubernur, sedangkan tugas dan fungsinya sepenuhnya diserahkan ke masing-masing provinsi lokasi program, dengan dasar surat tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/310/KPTS/013 tentang Forum Koordinasi Kemitraan Pembangunan Provinsi Jawa Timur, isinya menugaskan kepada anggota tim forum

koordinasi kemitraan pembangunan, diantaranya melaksanakan sosialisasi forum koordinasi mitra pembangunan, dan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dan Integrasi program / kegiatan pembangunan, dan memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan atau rencana tindak lanjut lembaga internasional / lembaga non pemerintah atau NGO di Jawa Timur.